

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) tahunan di Sulawesi Utara pada triwulan II 2021 ditinjau dari 2 (dua) kota penyumbang inflasi tercatat mengalami peningkatan, meskipun masih berada dalam rentang target inflasi nasional $3 \pm 1\%$ (yoy). Inflasi kota Manado pada triwulan laporan tercatat sebesar 2,41% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat inflasi 1,65% (yoy). Sebagaimana halnya pada triwulan I 2021, sumber tekanan inflasi kota Manado masih digerakkan terutama oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Adapun IHK Kotamobagu pada triwulan II 2021 juga mencatatkan inflasi sebesar 2,00% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,94% (yoy). Sebagaimana kota Manado, kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau juga menjadi faktor penyebab peningkatan tekanan inflasi kota Kotamobagu pada triwulan laporan selain kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pada awal triwulan II 2021, badai Tropis Surigae yang terjadi di Sulawesi Utara mempengaruhi tinggi gelombang laut yang merupakan faktor utama pertimbangan nelayan untuk berlayar. Anomali cuaca ini memberikan disinsentif nelayan untuk melaut sehingga mengurangi jumlah pasokan ikan di pasar. Di sisi lain, komoditas strategis Barito di Manado justru mengalami penurunan harga dalam periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 2021. Meski masih mengalami inflasi untuk komoditas cabai rawit dan tomat, namun cenderung lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya ketersediaan stok yang cukup untuk memenuhi konsumsi masyarakat yang didukung oleh adanya panen di beberapa sentra, sehingga keterjangkauan harga tetap terjaga. Disamping itu adanya Surat Edaran Gubernur yang meniadakan kegiatan open house pada saat Idul Fitri 2021 juga ditengarai memicu tertahannya konsumsi masyarakat.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka menjaga inflasi tetap terkendali pada rentang sasarannya, TPID provinsi dan kabupaten/kota senantiasa berupaya memfokuskan program-program pengendalian inflasi pada komoditas strategis penyebab inflasi di Sulawesi Utara. Sepanjang triwulan II 2021, upaya pengendalian inflasi yang telah ditempuh antara lain meliputi: a. Rapat Koordinasi dan High Level Meeting (HLM) TPID. Dalam rangka koordinasi dan pemantauan nilai inflasi di Provinsi Utara, telah dilaksanakan Rakor dan HLM TPID yang antara lain: 1) HLM TPID Kota Kotamobagu pada tanggal 4 Mei 2021 yang membahas perkembangan harga komoditas strategis serta program kerja TPID 2021; 2) HLM TPID Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 4 Mei 2021; 3) HLM TPID Kota Manado pada tanggal 17 Juni 2021 yang membahas program kerja TPID 2021; 4) Rapat koordinasi tim teknis TPID Kota Manado sebagai tindak lanjut HLM pada tanggal 24 Juni 2021. b. Pemantauan perkembangan harga kebutuhan pokok di pasar melalui pemantauan harga harian yang dilaksanakan dalam kerangka Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) di Kota Manado dan Kotamobagu. c. Melakukan koordinasi dalam rangka pengendalian inflasi periode HBKN melalui pasar murah yang dilakukan oleh TPID Kab. Bolaang Mongondow Utara (22-23 April 2021), TPID Kab. Bolaang Mongondow Selatan (23 April 2021), TPID Kab. Kepulauan Sangihe (6 dan 10 Mei 2021), TPID Kab. Minahasa (6 Mei 2021), TPID Kab. Minahasa Selatan (7 Mei 2021), dan TPID Kota Bitung (10 Mei 2021).

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Keberhasilan pengendalian inflasi bergantung pada komitmen, sinergi, dan koordinasi antar instansi dan lembaga untuk mewujudkan kerangka strategi 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Sesuai dengan Roadmap Pengendalian Inflasi Sulut tahun 2019-2021, TPID provinsi bersama dengan TPID kabupaten/kota memiliki program kerja strategis pengendalian inflasi tahun 2021 yang berfokus pada keempat hal tersebut.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Secara khusus, program TPID pada triwulan II 2020 menekankan pada upaya menjaga ketersediaan bahan pangan pokok dalam menghadapi HBKN di tengah situasi pandemi. Sementara ke depan, KPw BI Provinsi Sulut bersama TPID secara intensif akan bersinergi untuk memonitor perkembangan terkini pengendalian pandemi COVID-19, termasuk perkembangan permintaan kebutuhan dan pergerakan harga pangan. Implementasi program kerja yang telah dicanangkan melalui HLM TPID di triwulan I dan triwulan II 2021 juga terus diupayakan, salah satunya terkait dengan Kerja sama Antar Daerah (KAD) antara Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Gorontalo yang telah disepakati pada tanggal 18 September 2020. Penjajakan pada level pelaku usaha di tiga daerah ini terus dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan bahan pangan pokok terutama Barito.